

Implementasi Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Dalam Upaya Mitigasi Bencana Di Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2024

Aditya Noor Azmi¹, Suwaib Amiruddin², Ima Maisaroh³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹²³

Korespondensi Email : 6661210033@untirta.ac.id

Abstract

The Disaster-Resilient Village/Neighborhood Program (DESTANA) is one of the disaster mitigation initiatives developed by the National Disaster Management Agency through community-based disaster risk reduction policies. This study aims to examine the implementation of the Disaster-Resilient Village Program in disaster mitigation in Cigondang Village, Labuan Subdistrict, Pandeglang Regency, during 2023–2024. The approach used is descriptive qualitative, with data collection conducted through interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. George C. Edward III's policy implementation theory was used as the analytical framework, which includes four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research results indicate that the implementation of the Destana Program in Cigondang Village has not been optimal. In the communication dimension, information dissemination has not been equitable and remains focused on program implementers, resulting in limited community understanding. In the resource dimension, there are limitations in implementers' capacity, access to information, and a lack of infrastructure. In the disposition dimension, implementers' commitment tends to fluctuate due to reduced mentoring and the absence of incentives, even though the program is voluntary. Meanwhile, in the bureaucratic structure dimension, there is a lack of SOPs and local regulations, as well as weak cross-actor synergy. These findings underscore the need to strengthen cross-level policies so that program implementation can proceed more effectively, purposefully, and sustainably.

Keywords: Policy Implementation, Disaster Resilient Village, Disaster Mitigation, Cigondang Village.

Abstrak

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) merupakan salah satu upaya mitigasi bencana yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui kebijakan Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam mitigasi bencana di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023–2024. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori implementasi kebijakan George C. Edward III digunakan sebagai kerangka analisis, yang meliputi empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Destana di Desa Cigondang belum berjalan optimal. Pada dimensi komunikasi, penyampaian informasi belum merata dan masih terfokus pada pelaksana program, sehingga pemahaman masyarakat masih terbatas. Pada dimensi sumber daya, keterbatasan kapasitas pelaksana, akses informasi, serta minimnya sarana prasarana. Pada dimensi disposisi, komitmen pelaksana cenderung fluktuatif akibat berkurangnya pendampingan dan tidak adanya insentif, meskipun program bersifat sukarelawan. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi belum adanya SOP dan regulasi lokal serta lemahnya sinergi lintas aktor. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan lintas tingkat agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Desa Tangguh Bencana, Mitigasi Bencana, Desa Cigondang..

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan yang tinggi terkait dengan bencana alam. Hampir setiap tahun, berbagai peristiwa bencana terjadi dan berdampak pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tingginya potensi bencana di Indonesia terkait erat dengan kondisi geografisnya, yang berada di pertemuan empat lempeng tektonik utama yaitu Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik, sehingga aktivitas geologinya tergolong cukup tinggi. Selain itu, letak Indonesia yang berada di jalur Cincin Api Pasifik semakin meningkatkan risiko terjadinya berbagai jenis bencana alam, baik yang berskala kecil maupun besar (Rusfiana & Lestari, 2021). Kondisi tingginya kejadian bencana alam di Indonesia tercermin dari data yang dirilis oleh PDSI Pusdatinkom BNPB (2025). Sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 3.472 kejadian bencana alam yang terjadi dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu wilayah rawan bencana adalah Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan kondisi geologi Banten sangat rentan terhadap berbagai bencana karena lokasinya yang berada di zona aktif tektonik. Selain itu, kondisi iklim di Provinsi Banten memicu potensi bencana hidrometeorologi. Kombinasi faktor geologi dan iklim ini menjadikan Banten rawan terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan (BNPB, 2021). Data dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), di tahun 2024 Provinsi Banten dikategorikan dalam kelas risiko sedang dengan skor 128,64. Dengan Kabupaten Pandeglang yang menduduki nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tertinggi di angka 192.52. Kondisi ini menandakan bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, dengan kejadian bencana hampir terjadi setiap tahun, termasuk banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Tabel 1 Data Jumlah Kejadian Bencana per-Kecamatan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2022-2024

Kecamatan Teratas	2022 (Jumlah Kejadian Bencana)	2023 (Jumlah Kejadian Bencana)	2024 (Jumlah Kejadian Bencana)
1	Pagelaran (110)	Kaduhejo (18)	Patia (19)
2	Labuan (71)	Majasari (18)	Jiput (13)
3	Carita (28)	Pandeglang (17)	Majasari (12)

4	Patia (23)	Cimanuk (10)	Labuan (10)
5	Panimbang (21)	Labuan (7)	Kaduhejo (10)

Sumber: BPBD Provinsi Banten (diolah penulis, 2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tersebut, Kecamatan Labuan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pandeglang yang memiliki potensi kejadian bencana relatif tinggi. Kecamatan ini secara konsisten tercatat sebagai salah satu wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Labuan memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai kejadian bencana,

Pemerintah memiliki peran krusial dalam upaya penanggulangan bencana, mengingat tingginya potensi serta frekuensi kejadian bencana di wilayah Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari kebijakan mitigasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) untuk meminimalkan dampak bencana (Buchari, 2020). Dalam pelaksanaannya, pengembangan program PRB tersebut dituangkan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, yang mendefinisikan Desa Tangguh Bencana sebagai sebuah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumberdaya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana (Perka BNPB, 2012). Program ini mengharuskan semua elemen desa, termasuk pemerintahan desa, masyarakat, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), untuk mampu melaksanakan manajemen bencana guna memperkecil risiko yang ditimbulkan oleh potensi bencana (Wibisono et al., 2023). Salah satu lokasi pelaksanaan program ini adalah Desa Cigondang, yang berada di Kecamatan Labuan.

Desa Cigondang termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang relatif tinggi, khususnya terhadap banjir dan potensi tsunami, mengingat lokasinya yang berada di wilayah pesisir dan berdekatan dengan Selat Sunda. Dengan karakteristik sebagai wilayah pesisir yang memiliki ancaman multi-bencana (banjir dan tsunami), Desa Cigondang menjadi kasus penting untuk menguji bagaimana implementasi Destana berjalan pada konteks risiko tinggi yang membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan, bukan hanya pembentukan kelembagaan.

Di Desa Cigondang, implementasi program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana secara mandiri dan tanggap. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat kerawanan bencana di Desa Cigondang tidak diimbangi dengan kapasitas forum Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang memadai, kurangnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Desa Cigondang tidak terlepas dari minimnya bimbingan dan pemahaman yang memadai mengenai peran serta kontribusi masing-masing aktor lintas sektor dalam pengurangan risiko bencana. Selain itu keberlanjutan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di

Desa Cigondang menghadapi hambatan karena kurangnya pembinaan berkelanjutan dari BPBD Kabupaten Pandeglang.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi program Destana di berbagai daerah. Penelitian oleh Julius et al., (2020) yang berjudul "Implementasi Desa Tangguh Bencana di Desa Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat" menunjukkan bahwa implementasi Destana di Desa Gunung Geulis berjalan cukup aktif melalui kegiatan mitigasi seperti penanaman pohon dan pelatihan rutin. Penelitian lain oleh Putri & Wibowo, (2020) yang berjudul "Implementasi Program Desa tangguh Bencana (DESTANA) Sebagai Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi banjir di Desa Dadirejo" menunjukkan bahwa implementasi Destana umumnya berfokus pada pembentukan kelembagaan, pelatihan, dan penyediaan sarana prasarana kebencanaan. Penelitian oleh Watora & Ilham, (2024) yang berjudul "Mitigasi Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Badung Kelurahan Tanjung Benoa Provinsi Bali" menyimpulkan bahwa kearifan lokal masyarakat setempat sangat besar pengaruhnya terhadap proses penanganan bencana.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai implementasi Destana. Sebagian besar kajian lebih menitikberatkan pada aspek keberhasilan program, sementara analisis mengenai keberlanjutan implementasi setelah tahap pembentukan awal masih terbatas. Selain itu, kajian implementasi Destana di wilayah pesisir masih relatif sedikit dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji implementasi program Destana di Desa Cigondang sebagai wilayah pesisir dengan tingkat kerentanan bencana tinggi dan tantangan keberlanjutan program di tingkat desa.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan untuk menganalisis pelaksanaan Program Destana di Desa Cigondang. Menurut George C. Edwards III dalam Sawir (2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam proses kebijakan yang berada di antara pembentukan kebijakan, seperti tindakan legislatif, penerbitan perintah eksekutif, penyerahan keputusan peradilan, atau dikeluarkannya suatu peraturan, serta konsekuensi kebijakan yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang terdampak olehnya.

Lebih lanjut, George C. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi Sawir (2021) Keempat dimensi tersebut dinilai relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini, karena mampu menjelaskan berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Program Destana, mulai dari proses penyampaian informasi kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, sikap dan komitmen para pelaksana, hingga tata kelola dan pembagian peran dalam struktur birokrasi di tingkat desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Fenomena tersebut meliputi perilaku, pandangan,

motivasi, serta tindakan yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat dan dikaji secara menyeluruh. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi dan realitas yang terjadi di lapangan secara alami. Data penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif menggunakan bahasa dan kata-kata yang sesuai dengan konteks alamiah.

Penelitian ini berlokasi di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Desa Cigondang dipilih sebagai lokus penelitian karena merepresentasikan wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi, ditunjukkan oleh frekuensi kejadian bencana yang relatif konsisten serta kondisi geografis yang rawan terhadap bencana banjir dan tsunami. Selain itu, Desa Cigondang juga telah ditetapkan sebagai desa pelaksana Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukannya berbagai permasalahan. Pemilihan informan ditentukan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dengan menentukan informan berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program, memiliki pemahaman yang mendalam dan relevan terhadap topik yang sedang diteliti, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka (Sugiyono, 2020). Berikut beberapa informan, diantaranya adalah: Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Strategi BPBD Kabupaten Pandeglang, Fasilitator Daerah, Fasilitator Desa, Kepala Desa Cigondang, BPD Desa Cigondang, Ketua Forum Destana Desa Cigondang, Anggora Forum Destana Desa Cigondang, serta masyarakat Desa Cigondang.

Penelitian ini dilaksanakan pada periode tahun 2025, dengan fokus kajian pada implementasi program Destana tahun 2023–2024. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi Menurut (Hardani et al., 2020). Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dikutip dalam Abdussamad (2021). Model analisis tersebut meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara operasional, data hasil wawancara ditranskripsi, kemudian dikategorikan berdasarkan dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya data diinterpretasikan untuk menemukan pola dan ditarik kesimpulan.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan uji kredibilitas dengan menggunakan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selain itu, uji keabsahan data juga diperkuat melalui proses *member check* (Hardani et al., 2020).

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis data di lapangan menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C Edward III yang menekankan bahwa keberhasilan penerapan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian disusun dengan mengacu pada keempat dimensi tersebut.

A. Komunikasi

Dalam pelaksanaan program ini, komunikasi dilakukan melalui jalur formal seperti sosialisasi, pelatihan, dan simulasi yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga desa. Selain itu, komunikasi informal melalui grup WhatsApp juga menjadi sarana penting untuk koordinasi, penyampaian informasi, serta pengaturan kegiatan secara cepat dan fleksibel.

Namun, penyampaian informasi kepada masyarakat belum berjalan secara merata. Informasi lebih banyak terserap pada tingkat pelaksana, sementara masyarakat luas belum sepenuhnya memahami program Destana secara utuh. Hal ini disebabkan karena kegiatan sosialisasi dan pelatihan lebih terfokus pada kelompok tertentu, terutama anggota forum Destana.

“Kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut lebih diprioritaskan bagi 30 orang anggota Destana” (BPBD Kabupaten Pandeglang).

Akibatnya, keterlibatan masyarakat secara luas masih terbatas, sehingga tidak semua warga memperoleh informasi secara langsung mengenai program. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam proses penyampaian informasi, di mana penyampaian kebijakan belum menjangkau seluruh kelompok sasaran. Dalam perspektif George C. Edward III, komunikasi yang tidak merata ini disebabkan oleh keterbatasan jangkauan sosialisasi serta belum optimalnya peran pelaksana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas.

Minimnya sosialisasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat membuat sebagian warga tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tujuan program maupun upaya mitigasi yang seharusnya dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi belum merata, yang mengindikasikan keterbatasan strategi sosialisasi berbasis komunitas sebagaimana ditekankan dalam dimensi komunikasi menurut Edward III.

B. Sumber Daya

Ketersediaan anggota forum sebanyak 30 orang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Namun, jumlah dan kapasitas pelaksana program di desa belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan wilayah. Walaupun para anggota forum telah mengikuti pelatihan rutin, tingkat pemahaman dan kemampuan teknis masih berbeda-beda sehingga pelaksanaan kegiatan mitigasi dan penyebaran informasi belum merata. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kapasitas individu, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap informasi program di tingkat desa.

“Dokumen lengkap terkait program Destana banyaknya ada di fasilitator daerah, di desa hanya sebagian saja” (Kepala Desa Cigondang).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia berkaitan erat dengan minimnya informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh anggota forum di tingkat desa. Sebagian besar dokumen dan materi program masih terpusat pada fasilitator daerah, sehingga tidak semua anggota memiliki pemahaman yang sama terhadap substansi program. Hal ini menunjukkan adanya

keterkaitan antara keterbatasan sumber daya manusia dan distribusi informasi yang belum merata.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam kegiatan mitigasi belum tersedia secara memadai.

“Sarana dan prasarana juga masih kurang karena di Desa Cigondang belum ada anggaran khususnya untuk kegiatan forum Destana” (Kepala Desa Cigondang).

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa kendala fasilitas dipengaruhi oleh belum adanya alokasi anggaran khusus di tingkat desa untuk mendukung kegiatan Destana. Akibatnya, kegiatan mitigasi belum dapat dilakukan secara maksimal dan pelaksanaan program Destana akan sulit mencapai tujuan mitigasi bencana secara optimal di tingkat desa.

Dalam perspektif George C. Edward III, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kondisi sumber daya yang belum memadai di Desa Cigondang menjadi penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan Program DESTANA, karena pelaksana tidak memiliki dukungan yang cukup untuk menjalankan program secara efektif dan berkelanjutan.

C. Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi pelaksana cenderung bervariasi, antusiasme cukup tinggi pada masa awal kegiatan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pendampingan intensif serta dukungan kegiatan dari pemerintah. Namun, setelah tahap pembentukan selesai, aktivitas dan keterlibatan pelaksana cenderung menurun. Kondisi ini disebabkan oleh berkurangnya pendampingan serta minimnya kegiatan lanjutan yang terstruktur, sehingga komitmen pelaksana belum terinternalisasi secara kuat sebagai tanggung jawab berkelanjutan.

Selain itu, tidak adanya insentif juga menjadi faktor yang memengaruhi komitmen pelaksana dalam menjalankan program Destana di tingkat desa. Namun kondisi ini memang sesuai dengan karakter program berbasis relawan, di mana keterlibatan didasarkan pada kepedulian sosial, bukan imbalan finansial.

“Insentif itu ada kalau sedang ada kegiatan pelatihan atau sosialisasi. Ketika tidak ada insentif, ya semangatnya berkurang” (Fasilitator Desa).

Walaupun demikian, dalam praktiknya, ketiadaan insentif berdampak pada fluktuasi motivasi pelaksana. Aktivitas forum cenderung meningkat ketika terdapat kegiatan yang didukung pemerintah, tetapi menurun ketika tidak ada kegiatan atau dukungan eksternal.

Dalam perspektif George C. Edward III, disposisi pelaksana tidak hanya dipengaruhi oleh sikap dan komitmen individu, tetapi juga oleh dukungan sistem yang mampu menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, meskipun pendekatan sukarelawan menjadi kekuatan dalam membangun partisipasi

masyarakat, ketiadaan mekanisme pendukung seperti insentif non-finansial atau pembinaan berkelanjutan menyebabkan komitmen pelaksana belum terinternalisasi secara kuat.

Meskipun sifat sukarelawan merupakan karakter dasar program Destana, tetap diperlukan strategi penguatan motivasi, seperti pemberian insentif non-finansial, pengakuan kelembagaan, serta pembinaan rutin, agar komitmen pelaksana dapat terjaga dan implementasi program berjalan secara berkelanjutan di tingkat desa.

D. Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih sangat bergantung pada pedoman pusat, terutama Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, karena belum tersedianya standar pedoman lokal yang spesifik. Di tingkat desa, forum Destana hanya memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai dasar legalitas tanpa adanya Peraturan Desa dan SOP teknis yang mengatur prosedur pelaksanaan kegiatan mitigasi, penanganan bencana, ataupun kerjasama dengan pihak luar. Ketiadaan Peraturan Desa ini berdampak pada belum optimalnya pembagian tugas dan kewenangan antar aktor.

“Kami juga mendorong agar DPMPD Kabupaten Pandeglang memberikan penekanan kepada kepala desa mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Destana” (Fasilitator daerah).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa peran pelaksana di daerah masih berada pada posisi fasilitatif. Belum adanya regulasi tersebut tidak terlepas dari kurangnya sinergi lintas aktor serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam mendorong penyusunan pedoman turunan di tingkat desa. Ketergantungan yang tinggi terhadap pedoman pusat juga membuat pemerintah desa cenderung hanya mengikuti arahan yang ada tanpa mengembangkan standar operasional yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan lokal. Selain itu, berdampak pada pelaksanaannya masih sering dilakukan secara kolektif dan gotong royong tanpa mengikuti pembagian tugas yang rinci sesuai struktur formal.

Dalam perspektif George C. Edward III, struktur birokrasi yang tidak didukung oleh kejelasan aturan operasional serta lemahnya pembagian kewenangan akan menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa absennya regulasi tersebut berdampak langsung pada lemahnya koordinasi, pembagian tugas, dan keberlanjutan program di tingkat desa. Hal ini tentu membuat program Destana akan sulit berjalan secara konsisten dan berkelanjutan dalam mendukung upaya mitigasi bencana di Desa Cigondang.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas Implementasi Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Dalam Upaya Mitigasi Bencana di Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2024 belum berjalan optimal yang disebabkan oleh belum meratanya penyampaian informasi kepada masyarakat, keterbatasan kapasitas

dan fasilitas pendukung, fluktuasi komitmen pelaksana akibat minimnya pendampingan dan insentif, serta belum adanya SOP dan regulasi lokal yang didukung oleh sinergi lintas aktor dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlunya penguatan pada aspek komunikasi yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas dan ketersediaan sumber daya, serta penguatan kelembagaan melalui dukungan kebijakan di tingkat lokal agar program Destana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; Cetakan 1). Syakir Media Press.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Banten 2022 - 2026*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *Irbi : Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024* (R. Yunus, Ed.; Vol. 03). Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Buchari, A. (2020). Manajemen Mitigasi Bencana Dengan Kelembagaan Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 1(1), 1-10.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Husnu Abadi, Ed.; Cetakan I). Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Julius, A. M., Widyaningrum, N., Najib, A., Aminullah, A. A., Syarifah, H., Pratikno, H., Fadlurrahman, I., Adri, K., Suroso, T., Ramadhani, R. M., & Kerta Widana, I. D. K. (2020). Implementasi Desa Tangguh Di Desa Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. *Swabumi*, 8(1), 1-10. <https://doi.org/10.31294/Swabumi.V8i1.7543>
- Putri, E., & Wibowo, S. (2020). Implementasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Sebagai Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Banjir Di Desa Dadirejo. *Social Studies*, Vol 5 No 2.
- Rusfiana, Y., & Lestari, M. N. (2021). Strategi Antisipasi Potensi Bencana Alam Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Konstituen*, 3(1), 31-39.
- 'Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan; Konseptual Dan Praktik Publik*. Cv Budi Utama.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. 24, 1 (2007).
- Watora, N., & Ilham, A. A. (2024). Mitigasi Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Badung Kelurahan Tanjung Benoa Provinsi Bali. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 59-75.
- Wibisono, Wicaksono, W., Dinata, R. F. P., Harahap, R. N., Nazrina, F., Nurlindawati, & Dinariratri, A. S. (2023). Destana Patra: Desa Tangguh Bencana Berbasis Masyarakat Pesisir di Desa Sungai Kupah, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(3), 306-318. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.51562>